

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia masih merupakan Negara pertanian, artinya pertanian memegang peranan penting dari keseluruhan perekonomian nasional. Hal ini dapat ditunjukkan penduduk atau tenaga kerja yang hidup atau dari produk nasional yang berasal dari pertanian.

Indonesia adalah Negara yang sangat luas, tidak saja keadaan fisik daerah yang satu berbeda dengan keadaan daerah yang lain tetapi bahkan juga sifat-sifat dan kebiasaan cara berfikirnya. Untuk menjamin keberhasilan setiap perencanaan pembangunan harus disesuaikan dengan kondisi daerah-daerah. Daerah yang potensi pembangunannya besar akan segera Nampak dari respon yang diberikan pada program-program pembangunan nasional.

Proses pembangunan di Indonesia sejak awal telah difokuskan pada pergeseran aktivitas ekonomi dari semula terkonsentrasi pada sektor pertanian atau jasa, yang kemudian lebih dikenal dengan strategi industrialisasi. Dalam waktu relatif cepat, proses industrialisasi segera menampilkan hasil yang cukup mengembirakan, seperti ekspansi investasi, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, peningkatan pendapatan perkapita, dan kesempatan kerja yang bervariasi.

Pembangunan sistem pertanian merupakan pembangunan yang mengintegrasikan pertanian dengan industry dan jasa, di bidang pengairan

diarahkan pada usaha pengembangan, pemanfaatan air dari sumber-sumber dengan perencanaan teknis yang teratur dan serasi untuk mencapai manfaat sebesar-besarnya dalam memenuhi hajat dan perkehidupan, menunjang perekonomian daerah yang efektif dan kuat, serta meningkatkan taraf hidup petani itu sendiri.¹

Pembangunan pertanian diarahkan pada upaya meningkatkan pendapatan taraf hidup petani dan kualitas kehidupan melalui peningkatan diversifikasi produk pertanian guna memenuhi kebutuhan pangan, gizi serta keperluan ekspor. Pola pembangunan pertanian adalah melalui pola pertanian inti rakyat dengan penerapan teknologi maju dan tepat guna. Disini peran pemerintah khususnya Dina Pertanian sangat dibutuhkan, contohnya adalah pemerintah melalui Dinas Pertanian mengeluarkan kebijakan-kebijakannya dengan tidak memberatkan petani dengan mengeluarkan kredit modal usaha tani dengan bunga yang sangat rendah, atau dengan mengadakan program pupuk murah yang dapat didistribusikan melalui KUD atau bisa juga dengan cara menjual langsung kepada kelompok petani bekerjasama dengan produsen pupuk. Semua itu bertujuan untuk menciptakan sistem yang handal dan kuat guna memenuhi kebutuhan pangan nasional, sehingga di masa yang akan datang Negara kita tidak kekurangan stok pangan dan tidak tergantung pada impor beras dari Negara lain.

Keberpihakan Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pertanian terhadap pengembangan sektor pertanian perlu lebih ditingkatkan, karena pada

¹ Budiman, A, *Teori Pembangunan Dunia ketiga*, Gramdia Pustaka Tama, Jakarta, 2001 hal 7

kenyataan sektor pertanian mempunyai peranan yang cukup besar sebagai salah satu penyumbang dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) selain sektor industri perdagangan, dan jasa.

Pemanfaatan sektor pertanian harus bersinergi dengan pembangunan daerah dan harus berorientasi kepada pemberdayaan masyarakat. Hal ini dapat diwujudkan melalui networking/kerjasama yang terpadu antara Pemerintah Daerah, masyarakat, pihak swasta, dan pegawai negeri².

Pengembangan di sektor pertanian ialah untuk meningkatkan taraf hidup para petani, pendapatan daerah dan Negara yang mana kita ketahui bahwa Negara Indonesia merupakan Negara yang akan sumber daya alamnya. Salah satunya ialah sumber daya alam di bidang padi. Dimana Indonesia merupakan Negara pengekspor beras ke Negara-negara lain.

Di dalam konteks pengembangan pertanian, keberhasilan mengandung makna pergumulan pertanian yang tidak hanya dilakukan untuk mencapai swasembada pangan, akan tetapi lebih-lebih terutama untuk mengutamakan otonomi ekonomi, politik, dan kebudayaan mereka. Inilah konsep keberlangsungan pertanian kita yang demikian itu harus dilakukan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari suatu pembangunan nasional yang utuh dan terpadu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama petani.

Oleh karena itu studi ini ingin meneliti peran Dinas Pertanian Kabupaten Buru dalam mengelola sektor pertanian. Karena Kabupaten Buru adalah salah satu lumbung padi di Maluku. Dimana lahan sawah potensial di

² Asnawi.S. (1991) *Industrialisasi dan Pertanian Serta Pendapatan di Indonesia*, Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional V,IPTEK-LIPPI Jakarta

Kabupaten Buru seluas 10.000 hektar. Dalam musim tanam 2006 tergarap 4.083 hektar dengan produksi sekitar 16.100 ton, dengan rata-rata produksinya sebesar 4 empat) ton per hektar.

Sementara luas sawah³ yang telah dikelola sampai dengan tahun 2006 seluas 4.083 hektar, yang didukung oleh irigasi potensial 11,129 hektar dengan luas fungsional 5,332 hektar. Untuk kurun waktu lima tahun kedepan ditargetkan jumlah sawah yang dicetak seluas 10.000 hektar, dengan demikian masih membutuhkan dukungan irigasi teknis seluas 17,769 hektar.

Namun upaya meningkatkan produksi pertanian masih dihadapkan pada masalah irigasi teknis yang belum mampu melayani areal produksi pertanian, masih banyaknya lahan kering yang belum dimanfaatkan untuk lahan pertanian, terbatasnya sarana produksi pertanian, rendahnya kualitas petani, serta belum didukung oleh aksesibilitas wilayah yang menghubungkan kawasan-kawasan pertanian dengan pusat-pusat pemasaran sehingga hal ini dapat mengancam eksistensi Kabupaten Buru sebagai penghasil/lumbung padi di provinsi Maluku dan Nasional.

Disinilah peran aktif Dinas Pertanian Kabupaten Buru dituntut untuk lebih maksimal dalam mengembangkan pertanian terutama pada sektor pertanian pangan. Peran aktif masyarakat tersebut juga harus diimbangi oleh peran aktif masyarakat terutama para petani, sehingga perdikat dan eksistensi Kabupaten Buru sebagai lumbung pada Maluku dapat di pertahankan.

³ Dinas Pertanian Kabupaten Buru” Rencana Strategis (Renstra)” Tahun 2007

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis bermaksud mengadakan penelitian dengan judul Peran Dinas Pertanian Kabupaten Buru Dalam Mengelola Sektor Pertanian.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka peneliti sampaikan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Dinas Pertanian Kabupaten Buru dalam mengelola di sektor pertanian?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi pendukung dan penghambat dalam melaksanakan pengelolaan sektor pertanian?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui peran Dinas Pertanian Kabupaten Buru dalam mengelola sektor pertanian.
2. Mengetahui faktor apa sajakah yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam melaksanakan pengelolaan sektor pertanian.

D. Manfaat Penelitian

1. Penulis

Sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana dan diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan.

2. Dinas Pertanian

Untuk memberikan masukan kepada aparaturnya pemerintah pusat dan khususnya pemerintahan Daerah yaitu Dinas Pertanian dalam pelaksanaan tugasnya mengembangkan potensi pertanian khususnya tanaman pangan dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi penduduk.

3. Untuk masyarakat petani dalam memberikan sumbangan ide atau pemikiran mengenai peningkatan kesejahteraan petani.

E. Kerangka Dasar Teori

Dari teori sebagai unsur dalam penelitian sangat diperlukan mengingat fungsinya sebagai pedoman dan landasan untuk memahami berbagai permasalahan atau fenomena yang menjadi kajian. Melalui teori akan dapat dijelaskan secara sistematis mengenai hubungan antar konsep/variabel yang satu dengan yang lainnya dalam sebuah penelitian.

Menurut Sofyan Effendi, teori adalah “serangkaian asumsi, konsep, kontrak, defenisi, proposisi untuk menerangkan sesuatu fenomena social secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep”⁴.

Sedangkan menurut Koentjaraningrat, teori merupakan peraturan mengenai sebab akibat atau mengenai adanya suatu hubungan positif antara gejala-gejala yang diteliti di satu atau berbeda faktor tertentu dalam masyarakat.⁵

⁴ Sofyan Efendi, “*Metode Penelitian Survey*”, LP3ES, Jakarta. 1989, hal. 37

⁵ Koentjaraningrat, “*Metode-Metode Penelitian, Masyarakat*”, Gramedia, Jakarta, 1997, hal 9

Dari definisi tersebut di atas, maka teori mengandung tiga hal:

1. Teori adalah serangkaian proposisi antar konsep yang saling berhubungan.
2. Teori adalah menerangkan secara sistematis suatu fenomena sosial dengan cara menentukan hubungan antar konsep.
3. Teori menerangkan fenomena tertentu dengan cara menentukan konsep mana yang berhubungan dengan konsep lainnya dan bagaimana bentuk hubungannya tersebut.

Menurut Chaster I. Barnard mengemukakan bahwa : “organisasi adalah system kerjasama antar dua orang atau lebih”.

Dari pengertian organisasi di atas, dapat disimpulkan bahwa setiap organisasi harus di miliki tiga unsure dasar yaitu:

1. Orang-orang (sekumpulan orang)
2. Kerjasama.
3. Tujuan yang ingin dicapai

Dengan demikian organisasi merupakan sarana untuk melakukan kerjasama antara orang-orang dalam rangka mencapai tujuan bersama, dengan mendayagunakan sumber daya yang dimiliki.

Goal organisasi mempunyai makna yang berbeda menurut teori strategi rasional dan teori emergent strategi yaitu:⁶

1. Dalam teori strategi rasional goal organisasi di sebut dengan official goal yang mana official goal bersifat kaku dan general.

⁶ Achmad Nurmadi, *Manajemen Perkotaan*, Cetak Ketiga, Edisi Revisi, Sinergi, Yogyakarta, 2006. hal 195.

2. Dalam teori emergent strategi di kenal sebagai operational goal yang bersifat spesifik dan operasional. Bagi emergent strategi, goal organisasi tidak fix dan selalu berubah karena dorongan dari dalam maupun luar.

Bila dikaitkan dengan teori diatas maka Dinas Pertanian Kabupaten Buru mempunyai official goal yaitu mengembangkan dan meningkatkan mutu sektor pertanian yang meliputi, bidang pangan, perkebunan dan ketahanan pangan seperti yang telah ditetapkan.

Dari hal tersebut atas untuk mempermudah dan mendukung penelitian, berikut adalah penjabaran dari kerangka dasar teori yang diperlukan:

1. Otonomi Daerah

Secara estimologis otonomi berasal dari bahasa Yunani, Autos yang berarti sendirian dan Nomos yang berarti aturan atau undang-undang, maka apabila diterjemahkan per kata otonomi berarti peraturan sendiri undang-undang sendiri. Otonomi merupakan kata benda, sedangkan sifatnya adalah otonom. Mula-mula otonom atau berotomi berarti mempunyai hak/kekuasaan/kewenangan untuk aturan sendiri.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, yang dimaksud dengan daerah otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat melalui prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan menurut Undang-Undang yang sama yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom

daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Undang-Undang Nomor tahun 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang pertimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang mampu membuka celah luas bagi daerah untuk lebih cepat dapat mandiri dalam mengatur dan menurus rumah tanggahnya sendiri dengan mengoptimalkan pemanfaatan segala sumber daya yang di miliki secara efektif dan efisien.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 juga mampu memberi celah bagi masyarakat untuk lebih meningkatkan keberadaannya melalui partisipasi secara aktif dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, kontrol terhadap pemerintah, dan kegiatan sosial politiknya di daerah.

“Desentralisasi adalah sebagai bentuk pendidikan politik bagi masyarakat dan sebagai jalan untuk membina tanggung jawab daerah dalam melaksanakan tugas”.(Counyers, 1991)⁷

Menurut The Liang Gie, otonomi daerah adalah wewenang untuk menyelenggarakan segenap kepatuhan setempat yang diterima oleh daerah-daerah,⁸ sedangkan menurut Inu kencana Syafiee⁹ otonomi daerah itu sendiri berarti hak, wewenang dan kewajiban suatu daerah untuk

⁷ Agus Dwiyanto *“Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, Yogyakarta, 2003, hal.20

⁸The Liang Gie, *“Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia”*, Rajawali Press, Jakarta 1986, hal.44

⁹ Inu Kencana Syafee, *“Ilmu Pemerintahan : Mandar Maju*, Bandung 1994. hal.229

mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Fungsi mengatur diberikan kepada aparat legislatif yaitu DPRD, sedangkan fungsi mengurus diberikan kepada aparat eksekutif yaitu Kepala daerah dan Dinas-Dinas otonominya. Kewenangan otonom daerah yang mengacuh kepada kewenangan pembuat keputusan di daerah dalam menentukan tipe dan tingkat pelayanan yang diberikan masyarakat dan bagaimana pelayanan ini diberikan dan biaya.

Ada empat komponen dalam kewenangan daerah, yang pertama adalah kewenangan daerah secara signifikan terkait dengan kerangka legal pemerintahan daerah. Artinya sejauh mana kerangka legal dapat menjamin hak-hak- daerah di hadapan pemerintahan pusat. Kedua, hal ini tidak lepas dari tingkat kelulusan yang dilimpahkan kepada daerah masing-masing jenis pelayanan publik. Ketiga kewenangan daerah ini juga terkait dengan bentuk-bentuk pengaruh pusat yang tidak formal dalam penyelenggaraan fungsi yang telah dilimpahkan kepada daerah. Dan keempat kewenangan daerah juga terkait dengan kelulusan dalam membelanjakan keuangan daerah.

Sejalan dengan itu, Riswanda Imawan¹⁰ mengatakan bahwa keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah ditentukan oleh:

1. Semakin rendahnya tingkat ketergantungan (*degree of indepenency*) pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, tidak saja dalam perencanaan tetapi juga dalam penyediaan dana karena suatu rencana

¹⁰ Riswanda Imawan “*Dampak Pembangunan Nasional terhadap Peningkatan Kemajuan Daerah*”, Lamporan Penelitian Pusat antar Universitas (PAU), Studi Sosial,UGM,1991, hal.12-15

pembangunan hanya efektif kalau di buat dan dilakukan sendiri oleh pemerintahan daerah.

2. Kemampuan daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi mereka (*growth from inside*) dengan faktor-faktor luar yang secara langsung mempengaruhi laju pertumbuhan dari dalam. Dengan demikian pemerintah daerah lebih leluasa merencanakan dan menentukan prioritas pembangunan yang hendak dilaksanakan dari suatu daerah.

Faktor geografis dicerminkan oleh besarnya sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu daerah. Semakin besar dan bervariasi sumber daya yang dimiliki yang diikuti dengan semakin tingginya kemampuan daerah untuk mendayagunakan dan mengelolanya, makin besar kemampuan daerah untuk membangun dengan kemampuannya sendiri. Pertumbuhan dari dalam dari suatu daerah ditentukan oleh besarnya jumlah yang datang dari luar daerah. Hal ini tercermin dari besarnya investasi yang masuk ke suatu daerah. Peran penting dari sebuah investasi, baik investasi yang datang dari dalam negeri (*domestic*) ataupun yang datang dari luar negeri (*asing*) dalam memacu pertumbuhan pembangunan suatu daerah memang memiliki peran sangat signifikan. Semakin baiknya investasi yang masuk ke suatu daerah, di satu sisi mengindikasikan semakin baiknya ekonomi daerah yang bersangkutan, namun di sisi lain dapat menjadi faktor pemacu pertumbuhan ekonomi. Merumuskan berbagai kebijakan dan

melaksanakan fungsi kontrol terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan di daerah.

2. Pemerintahan Daerah

Pemerintahan daerah merupakan pelaksana dan penanggung jawab semua kegiatan pemerintahan yang di daerah otonom. Yang menjadi peran utama dari pemerintah daerah adalah melaksanakan pelayanan sebaik mungkin terhadap kepentingan masyarakat dan melaksanakan pembangunan sebagai usaha untuk memajukan daerah otonom tersebut.

Pemerintah daerah sebagai pengelola manajemen daerah otonom, di satu sisi memiliki tanggung jawab terhadap pemerintah pusat sebagai pemberi kewenangan atas pelaksanaan otonomi daerah dan pengendal Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun di sisi lain pemerintah daerah, juga harus mempertanggung jawabkan kepada masyarakat setempat.

Ryaas Rasyid menyebutkan tujuan utama dibentuknya pemerintah daerah adalah untuk menjaga suatu ketertiban sehingga masyarakat bisa menjalin kehidupannya secara wajar. Pemerintah pada hakikatnya adalah pelayan kepada masyarakat. Ia tidaklah diadakan untuk melayani diri sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi kemajuan bersama. Hal ini diatas mengacu pada pendekatan yang diperkenalkan oleh David Osborne_Ted Gaebier (1995),

bahwa dengan demikian pemerintah perlu semakin di dekatkan kepada masyarakat, sehinggah pelayanan yang diberikan semai kn baik.¹¹

Peran pemerintah daerah dalam meningkatkan sektor pertanian di laksanakan dengan cara memberikan pelayanan dan bantuan kepada masyarakat atau petani. yang di berikan melalui Dinas Pertanian. dimana pemerintah daerah memberikan kebijakan-kebijakan kepada Dinas Pertanian sebagai Dinas yang berperan penting dalam bidang pertanian.

Sangat disadari bahwa peran HKTI selama ini dalam pembangunan pertanian masih belum maksimal dan hal ini disebabkan antara lain karena program yang belum fokus dan menyentuh langsung petani, konsolidasi pengurus yang masih lemah serta belum maksimalnya komitmen dalam membangun pertanian. Sebagaimana diketahui bahwa kondisi negara pasca kenaikan BBM sangat berat menanggung beban akibat dampaknya terhadap kenaikan harga bahan pangan pokok lainnya sehingga kepedulian HKTI terhadap kondisi pangan harus ditingkatkan.

Komitmen nasional sebagaimana yang dinyatakan dalam GBHN 1999 – 2004 adalah mewujudkan ketahanan pangan. Komitmen tersebut didasarkan pada pemahaman atas peran strategis ketahanan pangan dalam pembangunan nasional minimal dalam 3 hal: pertama; akses terhadap pangan dengan gizi seimbang bagi segenap rakyat indonesia merupakan hak yang paling asasi bagi manusia. Kedua, peranan penting pangan bagi pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas. Ketiga, ketahanan pangan merupakan basis atau

¹¹ Riant Nugroho Dwidjowojoto, “*Otonomi Daerah, Desentralisasi Tanpa Revolusi*,” Alek Media Komputindo, Jakarta Media Komputido, Jakarta, 2000, hlm 9.

pilar utama dalam mewujudkan ketahanan ekonomi dan ketahanan nasional yang berkesinambungan. Sebagai tuntutan riil dalam pembangunan ketahanan pangan nasional adalah komitmen dalam membangun ketahanan pangan tingkat rumah tangga. Pemenuhan pangan bagi setiap individu selalu mendapat prioritas perhatian masyarakat dunia, baik di negara maju maupun di negara berkembang. World Summit yang diselenggarakan oleh FAO pada tahun 1996 memberi tekanan pada pentingnya ketahanan pangan dengan dikeluarkannya kesepakatan "Untuk mencapai ketahanan pangan bagi setiap orang dan untuk melanjutkan upaya menghilangkan kelaparan di seluruh negara." Sasaran menengah yang ingin dicapai adalah "Menurunkan jumlah orang yang kekurangan gizi menjadi setengahnya paling lambat tahun 2015" Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintahan daerah adalah Gubernur, Bupati/Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara daerah.

3. Peran Dinas Daerah

Dinas daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah. Daerah dapat berarti provinsi, Kabupaten, atau kota. Dinas Daerah menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum, serta pembinaan pelaksana tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Tugas pokok Dinas Pertanian Kabupaten Buru Yang termuat dalam Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2007 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pertanian Kabupaten Buru adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan dibidang Pembangunan Pertanian. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pertanian mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi tugas dibidang pembangunan pertanian Kabupaten Buru.

Untuk melaksanakan tugas-tugas pokok tersebut, maka Dinas Pertanian Kabupaten Buru mempunyai fungsi:

1. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pertanian
 - a. Pengaturan pemasukan atau pengeluaran bibit/benih tanaman pangan
 - b. Penetapan standar pengadaan dan pengelolaan distribusi bahan pangan
 - c. Penetapan standar teknis untuk memberantas hama pertanian.
2. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan kabupaten di bidang pertanian.
 - a. Pelayanan
 1. Memberikan Pelayanan Fasilitas pertanian
 2. Penyediaan alat transportasi dan alat pertanian
 3. Penyediaan tempat penyuluhan.
 - b. Pemberdayaan
 1. Memberikan pembinaan dan penyuluhan kepada petani dan pegawai Dinas Pertanian.

2. Memberikan pengaraahn bagi petani dalam memilih bibit yang baik.
 3. Pembentukan kelompok tani.
3. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga
 4. Melaksanakan tugas lain sesuai kebijakan yang di tetapkan oleh Bupati dibidang pertanian.

Sub sektor pertanian dalam pembangunan di bidang ekonomi khususnya di bidang ekonomi khususnya komoditi tanaman pangan mempunyai peran penyediaan pangan dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi penduduk, peningkatan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja serta menunjang ketahanan pangan di Maluku dan nasional sehingga pada akhirnya diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi kabupaten Buru.

Dalam pasal 124 undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 diatur mengenai dinas-dinas daerah sebagai berikut:

- a) Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah
- b) Dinas daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat atas usul sekretaris daerah.
- c) Kepala dinas Daerah bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui sekretaris Daerah.

Peran pemerintah di wujudkan dalam kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah daerah, yang didalamnya terbuat aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat demi berjalanya roda pemerintahan yang baik, dari kebijaka-kebijakan ini terdapat beberapa hal pokok seperti pelayanan, pelayanan bagi masyarakat, kita ketahui bahwa pemerintah ibarat pelayan rakyat, pemerintah mempunyai tugas untuk melayani masyarakatnya,.

4. Pengembangan Sektor Pertanian

Pengembangan merupakan suatu konsep yang tersusun dan terencana secara sistematis yang bertujuan untuk menciptakan suasana dari system baru. Sistem itulah yang kemudian memberikan kondisi bagi perkembanganya tata nilai dalam kehidupan masyarakat.¹² Kerap kali ketimpang pembagian hasil dari suatu pengembangan tidak merata dancenderung ekspolotatif sehingga banyak masyarakat yang tidak menikmati hasilnya. Dari proses inilah kita akan menjumpai kesenjangan pada proses hasil dari upaya memajukan sebuah peradaban.

Sektor pertanian sebagai salah satu sektor yang mempunyai peranan penting dalam menentukan stabilitas, ekonomi, sosial dan politik di Kabupaten Buru. Apalagi sebagian besar mata pencaharian penduduknya adalah petani.

Peran dan fungsi dinas yang dituangkan peraturan daerah Kabupaten Buru No. 18 Tahun 2007 tentang susunan organisasi dinas daerah Kabupaten

¹² Nasikun.J, "*Mencari Suatu Strategi Pembangunan Masyarakat Desa Berparadigma Ganda.*" Masalah Ekonomi PERHEPI, No.22.Th XIV,hal.81-89,1983

buru yang meliputi urusan pertanian tanaman pangan, perkebunan dan ketahanan pangan. Berdasarkan perda tersebut Dinas Pertanian Kabupaten Buru mempunyai program-program/arah kebijakan pembangunan bidang pertanian diantaranya:

Bidang pertanian dan perkebunan

1. Peningkatan Kesejahteraan petani

Kegiatan-kegiatan pokok yang akan dilaksanakan antara lain meliputi:

Pengembangan sektor Pertanian

2. Peningkatan Ketahanan Pangan

Kegiatan-kegiatan pokok yang akan dilaksanakan antara lain meliputi:

Intensifikasi dan ekstensifikasi tanaman pertanian, perkebunan dan horticultural, pembangunan dan rehabilitas irigasi teknis dan non teknis

3. Peningkatan Produksi Pertanian

Kegiatan-kegiatan pokok yang akan dilaksanakan antara lain meliputi:

Release Varietas Unggul lokal nasional padi fulan telo gawa, fulan telo mihat dan hotong¹³

Sementara pengembangan sektor pertanian di Indonesia dianggap penting dari keseluruhan pengembangan sektor lainnya. Berbeda alasan yang mendasari pentingnya pengembangan sektor pertanian di Indonesia:

1. Potensi sumber daya yang besar
2. Pangsa sektor pertanian terhadap pendapatan Nasional cukup besar.
3. Besarnya pangsa terhadap ekspor pertanian

¹³ Dinas Pertanian Kabupaten Buru ” Rencana Strategis (Renstra)” Tahun 2007

4. Besarnya penduduk yang menggantungkan hidupnya pada sektor ini
5. Peranan sektor pertanian dalam menyediakan pangan masih cukup besar
6. Menjadi basis pertumbuhan ekonomi di pedesaan

F. Defenisi Konsepsional

Definisi konsepsional merupakan suatu pengertian dari gejala yang menjadi pokok perhatian, defenisi konsepsional dimaksud sebagai gambaran yang jelas untuk menghindari kesalahpahaman terhadap pengertian atau batasan yang ada dalam pokok permasalahan. Jadi definisi konsepsional merupakan unsur pokok untuk menentukan ruang lingkup penelitian dan bahasan persoalan sehubungan dengan definisi konsepsional yang ada dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peran

Peran adalah tingkah laku individu yang mementaskan suatu kedudukan tertentu.

2. Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah adalah suatu kesatuan dan bagian dari kesatuan yang diberi kekuasaan dan kewenangan penuh untuk mengurus wilayahnya sendiri dan menetapkan peraturan-peraturan daerah, tetapi tetap dalam pengawasan dari pusat

3. Otonomi

Wewenang untuk menyelenggarakan segenap kepatuhan setempat yang diterima oleh daerah.

4. Pembangunan Sektor Pertanian
5. Peran Dinas Pertanian.

G. Defenisi Operasional

Defenisi operasional dijadikan pegangan dalam melakukan penelitian. Adapun definisi operasional ini dimaksudkan untuk memperjelas dan memperinci konsep yang telah dikemukakan. Definisi operasional mengubah konsep-konsep dengan suatu pengukuran yang menggunakan kata-kata yang menggambarkan perilaku atau gejala-gejala yang dapat diuji dan diamati.¹⁴

Sebagai pedoman dalam melakukan peneliti, indikator-indikator kegiatan yang digunakan yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian kabupaten Buru adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan Kebijakan Teknis Di Bidang Pertanian.
 - a. Pengaturan pemasukan atau pengeluaran benih/bibit tanaman pangan.
 - b. Pendapatan standar pengadaan dan pengelolaan dintribusi bahan pangan
 - c. Penetapan standar teknis untuk memberantas hama pertanian.
2. Pelayanan Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Buru Di Bidang Pertanian.
 - a. Pelayanan

¹⁴ Soerjono Soekamto, "Sosiologi Suatu Pengantar."Rajawali Press. Jakarta, 1987, hal.20

1. Memberikan pelayanan fasilitas perhatian
 2. Penyediaan alat transportasi dan alan pertanian
 3. Penyediaan tempat penyuluhan.
- b. Pemberdayaan.
1. Memberikan pembinaan atau penyuluhan terhadap petani dan bagi paegawaii Dinas Pertanian.
 2. Memberikan pengarahan bagi para petani
 3. Pembentukan kelompok tan

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif, diimana penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian. Dimana dalam meneliti peran Dinas pertanian dan Konservasi Sumber Daya Alam Kabupaten Buru status kelompok manusia, suatu kondisi, suatu pemikiran maupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Alasan penulis menggunakan metode deskriptif karena memang memungkinkan dalam penelitian yang dilakukan ini menggunakan metode deskriptif tersebut dengan melihat keadaan yang dihadapi. Penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau tulisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki dengan cirri:

- a. Berusaha untuk mengembangkan konsep dan menghimpun fakta dengan cara menggambarkan atau melukiskan keadaan obyek atau subyek penelitian
- b. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui peningkatan kualitas peran dinas pertanian
- c. Data yang dikumpulkan disusun, dianalisis dan digambarkan dalam bentuk tulisan¹⁵

2. Unit Analisis

Sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian. Ini maka unit analisisnya adalah Dinas pertanian Kabupaten Buru dengan Kebijakan_ kebijakan dalam menyangkut pengembangan sektor pertanian dan meningkatkan pendapat petani.

3. Teknik Pengumpulan Data

Beberapa cara yang digunakan dalam mengumpulkan data antara lain:

a) Observasi

Dimana dengan teknik ini akan menyusun dan untuk melibatkan secara langsung fenomena yang sedang diteliti, yaitu menyangkut masalah “Peran Dinas Pertanian Kabupaten Buru dalam Pengembangan Sektor Pertanian”.

b) Wawancara

Interview adalah teknik pengambil data dengan cara melakukan wawancara atau mengajukan pertanyaan langsung kepada responden guna

¹⁵ Imoh Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hal 63.

mendapatkan informasi yang diperlukan secara langsung dengan responden di tempat peneliti.

Dalam peneliti yang berjudul “Peran Dinas Pertanian kabupaten Buru dalam mengelolah Sumber Daya Alam di Sektor Pertanian”, peneliti mengadakan wawancara yang dilakukan kepada pegawai-pegawai yang ada di kantor Dinas pertanian Kabupaten Buru dan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini. Tujuan menggunakan teknik ini adalah untuk memperoleh penjelasan lebih lanjut mengenai data atau fenomena yang ada di tempat penelitian.

c) Dokumentasi

Dokumentasi adalah bahan-bahan tertulis yang mendukung kelengkapan data dari obyek penelitian, misalnya surat kabar, majalah, kajian-kajian pertanian, makalah-makalah seminar tentang pertanian dan sebagainya. Dokumen-dokumen yang diperlukan dalam penelitian adalah arsip-arsip, catatan monografi dan catatan-catatan lain yang diperlukan dalam penelitian ini terdapat di Dinas Pertanian Kabupaten Buru maupun Pemerintah daerah Kabupaten Buru.

4. Jenis Data

1. Dalam penelitian ini ada 2 (dua) jenis data yaitu data primer dan data sekunder, adapun pengertian dari kedua data tersebut adalah:
 - a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan pada saat penelitian yang dilakukan dengan melalau

wawancara dengan Kepala Bidang Pertanian Kabupaten Buru langsung dari sumber data berupa peran Dinas, struktur organisasi pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang ada dalam penelitian.

- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil atau bahan documenter tentang daerah penelitian. Dalam hal ini data yang dikumpulkan dari dokumen-dokumen yang berasal dari instansi-instansi atau unit kerja dan data-data yang bersumber dari Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Buru.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.¹⁶ Sedangkan menurut Dalton, analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisir ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar.¹⁷ Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Di mana data yang diperoleh diklasifikasikan, di gambar dengan kalimat, dipisahkan untuk memperoleh kesimpulan. Selanjutnya menganalisa dengan gejala atau obyek yang diteliti dan menginterpretasikan data atau dasar teori yang ada serta runtut menilai makna yang bersifat menyeluruh. Data tersebut diperoleh keabsahan data dalam penelitian.

¹⁶ Soekanto.S, *Teori Perubahan Sosial*, Gramedia Pustaka Tama, Jakarta,1999,hal.22

¹⁷ Lexi Moleong, "Metodelogi Penelitian Kualitatif.Remadja Rosdakarya,Bandung.1993,hal.103

Beberapa kriteria untuk menjelaskan tentang keberhasilan penulis lebih mudah selain juga lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri memahami masalah yang diteliti.